
Peran Shajar al-Durr dalam Politik Mesir Abad ke-13

Intan Wulansari¹, Daud Rasyid², Abdullah Ghulam Nazih³, Dewi Nurani⁴, Evalinda⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta

intan81wulansari@gmail.com¹, daud.rasyid@staff.uinjkt.ac.id², nayzih@gmail.com³,

dewi.blessang@yahoo.com⁴, evalinda.uia@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This study examines the role of Shajar al-Durr in the dynamics of 13th-century Egyptian politics, particularly during the transition from the Ayyubid to the Mamluk Dynasty, and her contribution to maintaining state stability amidst internal and external threats. This study is motivated by the lack of research that places women as central actors in pre-modern Islamic political history. The study uses a qualitative approach through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, by examining classical chronicles and contemporary studies by Muslim scholars. The results show that Shajar al-Durr played significant administrative and political roles, such as maintaining government continuity after the death of Sultan al-Ṣāliḥ, coordinating crisis management during the Seventh Crusade, and being a major catalyst in the emergence of the Mamluk power structure. The findings also confirm that her leadership was not only driven by emergency conditions, but also by personal capacities such as political acumen, patronage networks, and the ability to manage symbolic legitimacy. The research discussion shows that despite her short and controversial reign, Shajar al-Durr provided an important foundation for the consolidation of Mamluk power, while also opening up space for a re-reading of the role of women in Islamic political history.*

Keywords: *Shajar Al-Durr, 13th Century Egyptian Politics, Ayyubid Dynasty, Mamluk Dynasty.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji peran Shajar al-Durr dalam dinamika politik Mesir abad ke-13, terutama pada masa transisi dari Dinasti Ayyubiyah menuju Mamluk, serta kontribusinya dalam mempertahankan stabilitas negara di tengah ancaman internal dan eksternal. Kajian ini dilatarbelakangi oleh minimnya penelitian yang menempatkan perempuan sebagai aktor sentral dalam sejarah politik Islam pra-modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan menelaah kronik klasik dan studi kontemporer dari cendekiawan Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shajar al-Durr memainkan peran administratif dan politis yang signifikan, seperti menjaga kelangsungan pemerintahan setelah wafatnya Sultan al-Ṣāliḥ, mengoordinasikan manajemen krisis selama Perang Salib VII, serta menjadi katalis utama dalam munculnya struktur kekuasaan Mamluk. Temuan juga menegaskan bahwa kepemimpinannya tidak hanya didorong oleh kondisi darurat, tetapi juga oleh kapasitas personal berupa kecerdasan politik, jaringan

patronase, dan kemampuan mengelola legitimasi simbolik. Diskusi penelitian memperlihatkan bahwa meskipun masa pemerintahannya singkat dan kontroversial, Shajar al-Durr memberikan fondasi penting bagi konsolidasi kekuasaan Mamluk, sekaligus membuka ruang bagi pembacaan ulang peran perempuan dalam sejarah politik Islam.

Kata Kunci: Shajar Al-Durr, Politik Mesir Abad Ke-13, Dinasti Ayyubiyah, Dinasti Mamluk.

PENDAHULUAN

Abad ke-13 merupakan masa transisi di Mesir karena kekuatan Dinasti Ayyubiyah melemah sementara kelompok Mamluk budak-prajurit yang dimanusiakan menjadi aktor politik semakin menguat. Dalam konteks krisis militer menghadapi Perang Salib VII, muncul figur perempuan luar biasa, Shajar al-Durr, yang dari posisi harem mampu menjelma menjadi aktor politik sentral. Peristiwa ini harus dibaca sebagai produk struktur sosial-militer Ayyubiyah dan peluang politik yang tercipta akibat situasi darurat. Variasi penulisan nama Shajar al-Durr dalam sumber klasik (al-Maqrīzī, Ibn Taghrī Birdī, dsb.) mencerminkan cara berbeda para penulis dan cakupan geografis tradisi penulisan Arab. Perbedaan ini juga menunjukkan bagaimana identitasnya kerap dikonstruksi sesuai kebutuhan naratif pengarang.¹

Menurut penelitian-penelitian mahasiswa dan peneliti Muslim kontemporer di Indonesia dan Mesir, Shajar al-Durr kemungkinan besar berasal dari lingkungan budak istana (Turki/Armenia dalam beberapa keterangan) dan pertama kali tercatat di istana Abbasiyah sebelum memasuki lingkungan Ayyubiyah, sebuah lintasan sosial yang umum bagi banyak perempuan istana pada masa itu. Bukti administratif dan kronik lokal mencatat kemunculannya sejak 1239 M.² Ketika al-Ṣāliḥ Ayyūb jatuh sakit dan pasukan Salib mendarat di Damietta (1249), kekosongan informasi terkait kondisi sultan memicu langkah politik ekstrem. Shajar al-Durr bersama pejabat istana merahasiakan wafatnya sang sultan untuk menjaga moral pasukan dan kohesi politik. Langkah ini menunjukkan kecakapan

¹ Khader Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', *Arts and Social Sciences Series*, 2.4 (2024), pp. 359–97, doi:10.59759/art.v2i4.409.

² Nurwahida B, 'Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M' (unpublished, UIN Alauddin Makassar, 2022).

administrasi istana yang mampu menjaga kelangsungan negara di tengah kekacauan militer.³

Keputusan menutup kabar wafatnya sultan membuka ruang bagi tindakan-tindakan strategis seperti pengaturan suplai, komunikasi antarkomandan Mamluk, dan penunjukan kepala pemerintahan sementara. Sumber-sumber kontemporer menjelaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar tipu daya, melainkan manuver kenegaraan yang dimaksudkan untuk mencegah kepanikan dan intervensi eksternal.⁴ Peran Shajar al-Durr pada fase ini tidak dapat direduksi menjadi peran domestik semata. Ia mengambil keputusan-keputusan administratif penting terkait logistik perang dan legitimasi pemerintahan hingga kedatangan Turansyah, yang menandai bahwa perempuan istana bisa berfungsi sebagai pengelola negara dalam situasi ekstrim. Temuan-temuan studi akademik Muslim modern menyoroti aspek ini sebagai contoh statecraft yang dilakukan oleh aktor non-tradisional.⁵

Peristiwa al-Manshûrah (Februari 1250) dan kekalahan pasukan Perancis di sana (termasuk tewasnya Robert of Artois) membuka jalan bagi perubahan rezim. Shajar al-Durr sebagai figur administratif yang menjaga kelangsungan komando Mamluk dan mendukung aksi-aksi lapangan yang akhirnya menawan Louis IX. Setelah Turansyah tiba lalu terbunuh oleh unsur-unsur Mamluk karena konflik internal, para pemimpin Mamluk memilih mengangkat Shajar al-Durr sebagai pemimpin sementara. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa legitimasi di lapangan (di antara komandan militer) bisa mengalahkan klaim dinasti tradisional. Analisis- analisis lokal menggarisbawahi bahwa legitimasi Mamluk bersifat pragmatis dan berorientasi pada stabilitas militer.⁶

Masa kepemimpinan Shajar al-Durr (sekitar 80 hari) adalah titik singkat namun simbolis. Ia menjadi jembatan antara Ayyubiyah yang runtuh dan pola pemerintahan Mamluk yang akan datang. Studi-studi kontemporer menekankan nilai simbolis ini dalam proses konsolidasi kekuasaan, bukan sebagai awal sistem dinasti yang stabil yang baru terbentuk setelah konsolidasi oleh amir Mamluk. Penolakan khalifah Abbasiyah terhadap pengangkatan

³ Dewi Widiyanti and Muammar Firdaus, 'Interpreting Women's Emancipation in the Context of Islamic Multiperspectivism: An Analytical Approach', *Saree: Research in Gender Studies*, 5.1 (2023), pp. 19–36, doi:10.47766/saree.v5i1.1003.

⁴ Mohammad Muttaqin and others, 'Shajar Al-Durr and Women's Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!', *Proceedings of the 5th International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies, IGCIIS 2022, 19-20 October 2022, Mataram, Lombok, Indonesia*, doi:10.4108/eai.19-10-2022.2329044.

⁵ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

⁶ Nurwahida B, 'Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M'.

perempuan sebagai penguasa memperlihatkan batas-batas legitimasi religi-institusional pada masa itu. Meski demikian, dukungan militer lokal tetap memungkinkan Shajar al-Durr mempertahankan pengaruh politik bahkan setelah ia menyerahkan takhta ke Aybak melalui pernikahan politik.⁷

Hubungan antara Shajar al-Durr dan faksi-faksi Mamluk menunjukkan betapa jaringan patronase dan loyalitas unit militer menjadi penentu dalam politik pasca-Ayyubiyah. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masa singkat pemerintahan Shajar al-Durr seperti pencetakan koin, pembacaan namanya dalam khutbah, dan pengaturan hadiah/iqtā' untuk prajurit adalah instrumen klasik legitimasi politik Islam. Langkah ini sebagai usaha cepat membangun legitimasi formal sambil menjaga keseimbangan antara klaim khalifah, warisan Ayyubiyah, dan realitas kekuatan Mamluk.⁸

Konflik internal yang berlanjut antara Shajar al-Durr dan Aybak (hingga pembunuhan Aybak pada 1257 atas perintah Shajar al-Durr menurut sebagian laporan) menggambarkan dilema politik seorang perempuan yang mencoba mempertahankan pengaruhnya dalam sistem yang menolak kepemimpinan perempuan. Eksekusi tragis Shajar al-Durr (April 1257) oleh unsur-unsur Mamluk yang marah dan pembunuhan simbolis (penghinaan publik) oleh pihak istana menutup bab pendek namun kritis dalam sejarah Mesir. Kasus ini sering dipakai dalam studi gender sejarah dan kajian politik sebagai contoh risiko ekstrem bagi perempuan yang memasuki arena kekuasaan secara formal.⁹

Arsitektur dan wakaf yang terkait dengan nama Shajar al-Durr (mausoleum dekat Masyhad Sayyidah Nafisah, Madrasah al-Ṣālihiyah) menjadi materi penting untuk mengkaji upaya legitimasi melalui patronase budaya. Bagaimana patronase arsitektural berfungsi memperkuat kenangan politik serta klaim status. Bagi studi politik Islam modern, kasus Shajar al-Durr relevan sebagai studi tentang *exceptional rule*, bagaimana aturan, agama, dapat dipertemukan sementara waktu oleh kebutuhan negara. Dari perspektif historiografi Arab modern, Shajar al-Durr sering dibaca ulang oleh penulis Arab kontemporer untuk menonjolkan peran perempuan. Studi-studi yang tersedia secara terbuka menunjukkan ketegangan antara bacaan populer yang heroik dan analisis akademik yang lebih berhati-hati.

⁷ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

⁸ Widiyanti and Firdaus, 'Interpreting Women's Emancipation in the Context of Islamic Multiperspectivism: An Analytical Approach'.

⁹ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mencakup empat tahap utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti karya al-Maqrīzī, Ibn Taghrī Birdī, dan al-Yūnīnī, serta kajian kontemporer karya cendekiawan Muslim yang tersedia melalui repositori akademik dan jurnal lima tahun terakhir. Tahap kritik dilakukan melalui evaluasi kritik eksternal untuk menilai keaslian dokumen sejarah, serta kritik internal guna menilai reliabilitas, bias, dan kecenderungan ideologis penulis kronik. Tahap interpretasi dilakukan dengan mengaitkan data sejarah dengan konteks sosial-politik abad ke-13, terutama dinamika transisi dari Ayyubiyah ke Mamluk, peran perempuan dalam struktur istana, dan hubungan antara kekuasaan militer dan legitimasi politik. Seluruh data kemudian disintesis pada tahap historiografi untuk menghasilkan narasi ilmiah yang objektif dan menyeluruh mengenai peran Shajar al-Durr dalam politik Mesir, mencakup biografi, kiprah politik, diplomasi, serta kontroversi kepemimpinannya. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya menggambarkan fakta sejarah, tetapi juga menafsirkan dinamika kekuasaan yang membentuk peran strategis Shajar al-Durr dalam sejarah politik Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Dinasti Ayyubiyah di Mesir Sebelum Terbentuknya Dinasti Mamluk

Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Ṣalāḥ al-Dīn (Salahuddin) pada akhir abad ke-12 membentuk kembali peta politik Mesir dan Syam, menggantikan struktur pemerintahan Fatimiyah Syiah dengan model kenegaraan Sunni yang kuat dan militaristik. Konsolidasi ini didorong oleh perpaduan legitimasi religius dan perangkat militer profesional yang menjadi ciri khas Ayyubiyah.¹⁰ Struktur administratif Ayyubiyah mengintegrasikan iqtā' (penguasaan tanah yang diberikan kepada militer) sebagai elemen sentral pendanaan angkatan perang. Dengan demikian stabilitas politik sangat tergantung pada hubungan patron klien antara penguasa dan amir-amir militer. Ketergantungan semacam ini membuka celah bagi kekuatan militer non-keturunan (Mamluk) untuk memperoleh pengaruh.¹¹

Sejak era al-Kāmil dan al-Nāṣir, politik Ayyubiyah mulai menunjukkan retakan dengan

¹⁰ Jusmiati Jusmiati, 'Peranan Shalahuddin Al-Ayyubi Terhadap Dinasti Ayyubiyah' (unpublished, UIN Alauddin Makassar, 2021).

¹¹ Bruno Tadeu Salles, 'The Iqtā' System in Egypt or the Backbone of the Mamluk Sultanate', *Antiteses*, 17.33 (2024), pp. 384–423, doi:10.5433/1984-3356.2024v17n33p384-423.

pembagian wilayah di kalangan cabang keluarga Ayyub dan menyebabkan fragmentasi otoritas di Mesir, Syam, dan Jazirah. Proses yang memperlemah pusat dan memberi peluang faksi militer untuk memanipulasi politik.¹² Pada masa al-Ṣāliḥ Najm al-Dīn Ayyūb (memerintah 1240–1249 M), upaya memperkuat kekuasaan monarki lewat pembelian dan pelatihan Mamluk secara besar-besaran sebenarnya merupakan strategi defensif. Sultan ingin menetralkan ancaman Kurdi dan menambah pasukan terpercaya. Namun kebijakan ini secara ironis menumbuhkan kekuatan militer yang kelak bertransformasi menjadi aktor politik otonom.¹³

Al-Ṣāliḥ juga mengembangkan infrastruktur militer (barak, markas di Jazīrat al-Rauḍah, dan madrasah militer) untuk membina loyalitas Mamluk Bahri. Investasi semacam ini meningkatkan profesionalisme militer tetapi melemahkan kontrol sipil tradisional atas kekuatan senjata. Langkah ini sebagai akar struktural munculnya Mamluk sebagai kelas penguasa. Faktor ekonomi juga berperan, penurunan penerimaan pajak dari sektor pertanian akibat gangguan perang dan tekanan eksternal mengurangi kemampuan pusat untuk membayar birokrasi dan amir. Keadaan fiskal yang tertekan mendorong sultan memberi iqtā' dan hadiah kepada militer yang menambah ketergantungan pada loyalitas berbasis materi.¹⁴

Ketika Perang Salib VII (ekspedisi Louis IX, 1249–1250) meletup, Mesir menghadapi ancaman eksternal pada saat kapasitas politik internal sedang rapuh. Sultan sakit, putra mahkota jauh, dan jaringan loyalitas sedang diuji. Kondisi inilah yang membuka ruang manuver bagi para komandan militer untuk bertindak sebagai penentu nasib negara.¹⁵ Praktik politik al-Ṣāliḥ, yang sering mendelegasikan wewenang administratif kepada pejabat istana dan komandan yang dipercaya, membuat lembaga pemerintahan berfungsi fleksibel tetapi juga menciptakan titik pusat otoritas paralel. Lingkungan yang memudahkan pengambilalihan kekuasaan cepat oleh Mamluk ketika kesempatan muncul.

Di tingkat sosial-kultural, struktur harem dan posisi budak istana (termasuk perempuan istana yang menjadi perantara politik) menambah dimensi unik koneksi istana ke militer dapat berjalan melalui jaringan personal, bukan hanya lewat lembaga formal. Fenomena ini

¹² Khoiru Ummatin, *Peradaban Islam Penelusuran Jejak Sejarah* (Kurnia Kalam Semesta, 2021).

¹³ Sulaeman Ahmad, 'Kontribusi Dinasti Mamluk Terhadap Peradaban Islam Tahun 1250-1517 M' (unpublished, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2024).

¹⁴ Salles, 'The Iqtā' System in Egypt or the Backbone of the Mamluk Sultanate'.

¹⁵ Naura Nadhifah, Arieni Alfakhaera, and Wildana Wargadinata, 'Dinasti Mamluk: Dari Prajurit Budak Ke Penguasa Mesir Dan Suriah', *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3.Maret (2025), pp. 421–29 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>>.

menjelaskan munculnya aktor-aktor non-tradisional yang memainkan peran krusial dalam transisi. Sementara itu, kebijakan luar negeri Ayyubiyah yang agresif namun terfragmentasi menguras sumber daya dan konsentrasi politik. Intervensi di Suriah dan upaya mengendalikan rute haji memaksa sultan mempertahankan garnisun yang mahal, sehingga memperkecil kapasitas pusat dalam menghadapi gempuran internal maupun eksternal.¹⁶

Studi-studi Muslim kontemporer menekankan bahwa penurunan otoritas religius Abbasiyah di Baghdad dan persaingan legitimasi Sunni–Syiah turut memengaruhi politik Ayyubiyah. Sultan harus menginvestasikan legitimasi lewat madrasah, wakaf, dan patronase ulama untuk memperkuat pemerintahan. Kebijakan yang mahal namun penting demi stabilitas ideologis.¹⁷ Di lingkungan militer, pembentukan korps Mamluk Bahri (berbasis etnis Kipchak/Turki) menciptakan kohesi internal yang kuat sehingga ketika komandan-komandan tersebut berhadapan dengan ancaman nyata (seperti invasi Salib), mereka mampu bertindak kolektif lalu menuntut pengaruh politik lebih besar sebagai imbalan atas jasa militer.¹⁸

Keputusan untuk merahasiakan wafatnya al-Ṣāliḥ dan menyelenggarakan pemerintahan bayangan oleh unsur istana adalah refleksi dari kecemasan terhadap implikasi moral dan militer pengungkapan saat pasukan musuh mengancam. Tindakan tersebut menegaskan bagaimana norma kenegaraan dapat diubah sementara demi survival. Setelah kematian al-Ṣāliḥ, keterlambatan kedatangan Turansyah (putra yang berada jauh di Hasankeyf) memberi peluang aktor lokal (Fakhr al-Dīn, Jamāl al-Dīn, komandan Mamluk) untuk menata pemerintahan sementara. Manuver ini mengilustrasikan bahwa kedekatan (proximity) kepada pusat kekuasaan fungsional seringkali lebih menentukan hasil politik daripada klaim garis keturunan semata.¹⁹

Kemenangan melawan pasukan Salib di al-Manshûrah meneguhkan kekuatan Mamluk sebagai pembela bangsa dan memberi legitimasi *de facto* bagi mereka untuk mengatur nasib pemerintahan Mesir, sehingga transisi dari kekuasaan Ayyubiyah ke Mamluk menjadi hampir tak terelakkan. Kondisi ini membuka jalan bagi momen momentum politik. Era akhir Ayyubiyah juga memperlihatkan pergeseran budaya politik dari sultan yang mengandalkan jaringan keluarga Kurdi menuju sistem yang lebih mengutamakan meritokrasi militer (dalam

¹⁶ Ummatin, *Peradaban Islam Penelusuran Jejak Sejarah*.

¹⁷ Khairul Mizan and others, 'HISTORY OF ISLAMIC CIVILIZATION IN THE AYYUBIYAH DYNASTY (1171-1250 AD)', *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 15.1 (2023), pp. 27–50, doi:10.21093/fj.v14i2.5357.

¹⁸ Ahmad, 'Kontribusi Dinasti Mamluk Terhadap Peradaban Islam Tahun 1250-1517 M'.

¹⁹ Nurwahida B, 'Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M'.

batas-batas tertentu) dan patronase baru. Perubahan ini memberi struktur bagi munculnya Mamluk sebagai kekuatan pemerintahan yang berkelanjutan.²⁰

Ekspansi Pasukan Salib ke Mesir pada Masa Sultan al-Salih Najmuddin Ayyub

Pada Juni 1249 pasukan Salib yang dipimpin Louis IX mendarat dan berhasil merebut Damietta. Keberhasilan awal ini bukan sekadar operasi militer kecil melainkan bagian dari strategi besar untuk menaklukkan Mesir, wilayah yang dianggap kunci untuk menguasai Syam. Taktik pendaratan di Delta Nil memperlihatkan penilaian strategis pasukan Eropa terhadap rentetan rute suplai dan posisi geografis Mesir, namun medan Delta yang rawa dan panjangnya jalur logistik segera memperlihatkan kelemahan kampanye Salib. Saat krisis menyala, kondisi kesehatan Sultan al-Ṣāliḥ Najm al-Dīn memburuk. Sakitnya sultan secara drastis mengurangi kapasitas pengambilan keputusan di pusat dan memaksa para pejabat istana mencari mekanisme darurat untuk menjaga kontinuitas pemerintahan.²¹

Salah satu mekanisme darurat yang dipilih adalah menutup rapat berita wafat atau kondisi kritis penguasa agar moral pasukan tidak runtuh. Langkah politik-manajerial yang memerlukan koordinasi birokratik tinggi dan jaringan komunikasi istana.²² Dalam konteks itu, figur Shajar al-Durr muncul bukan sebagai agen simbolik semata, melainkan sebagai koordinator administratif. Ia berperan dalam menjaga ritus kenegaraan (meterai, surat, khutbah) dan mengatur perintah agar negara tetap berfungsi saat otoritas formal terganggu. Pengorganisasian suplai logistik untuk garnisun dan pasukan yang menghadapi pasukan Salib menjadi prioritas. Bukti-bukti administratif menunjukkan adanya upaya intensif memastikan bahan bakar, makanan, dan amunisi tetap mengalir ke posisi strategis, kegiatan yang membutuhkan koordinasi istana-militer.²³

Para komandan Mamluk, yang terlatih dan telah diperkuat oleh kebijakan al-Ṣāliḥ sebelumnya, menjadi tulang punggung perlawanan di lapangan. Kapasitas mereka untuk bermanuver di medan Delta dan melakukan serangan balasan membalikkan keadaan.

²⁰ Ummatin, *Peradaban Islam Penelusuran Jejak Sejarah*.

²¹ Muhammed Othman, Karim Hamza, and Farag el HUSSINY, 'A COMPLETE READING FOR THE FOUNDATION INSCRIPTION OF AL-MADĀRES AL-ṢĀLEḤIYĀ AND ITS ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE PUBLISHED FOR THE FIRST TIME', *Shedet*, 10.10 (2023), pp. 246–60, doi:10.21608/shedet.2023.292148.

²² Azza El Kholy, 'Al-Durr, Shajarat', in *Oxford Research Encyclopedia of African History* (Oxford University Press, 2020), doi:10.1093/acrefore/9780190277734.013.486.

²³ Othman, Hamza, and el HUSSINY, 'A COMPLETE READING FOR THE FOUNDATION INSCRIPTION OF AL-MADĀRES AL-ṢĀLEḤIYĀ AND ITS ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE PUBLISHED FOR THE FIRST TIME'.

Kemenangan di pertempuran-pertempuran lokal (Asymûn, al-Manshûrah) bukan produk kebetulan, melainkan hasil sinergi antara kecakapan administrasi istana yang menjaga kontinuitas negara dan teknik tempur Mamluk di medan perang. Praktik menutup wafatnya sultan mengharuskan staf istana untuk meniru tanda-tanda pemerintahan (dokumen, meterai, perintah resmi) sehingga rantai komando tidak tampak putus. Pekerjaan ini adalah contoh jelas bagaimana ritual kenegaraan dapat menjadi instrumen ketahanan negara.²⁴

Keberhasilan menahan dan kemudian memukul mundur pasukan Salib mencapai puncak ketika Louis IX ditangkap setelah operasi lapangan di Fâriskûr. Peristiwa yang sekaligus meneguhkan legitimasi praktis aktor-aktor yang bertindak selama krisis. Penangkapan Louis IX dan negosiasi pembebasan yang menyertainya menunjukkan kapasitas diplomatik pihak Mesir untuk memanfaatkan kemenangan militer menjadi alat negosiasi yang menguntungkan secara politik dan material.²⁵ Kedatangan Turansyah (putra al-Şâlih) lalu menandai transisi formal, tetapi ketegangan internal segera muncul karena persaingan pengaruh antara unsur-unsur yang mengelola krisis dan klaim garis keturunan. Situasi ini menunjukkan bahwa kemenangan di medan perang tidak otomatis menerjemah menjadi stabilitas politik.

Banyak studi kontemporer dari lingkungan akademik regional menunjukkan bahwa jaringan istana termasuk perempuan istana berfungsi sebagai backup institusional yang merawat kontinuitas negara ketika eksekutif tradisional tidak mampu bekerja. Shajar al-Durr adalah contoh ekstrem dari mekanisme ini. Administrasi darurat tidak lepas dari risiko. Aktor yang mengambil peran sering menjadi target politik setelah krisis usai. Pengalaman Shajar al-Durr memperlihatkan bagaimana tindakan menyelamatkan negara sekaligus menempatkan dirinya dalam posisi rentan ketika konstelasi politik kembali normal.²⁶ Dari sudut militer-strategis, kegagalan ekspedisi Salib di Mesir memperlihatkan kelemahan strategi invasi yang tidak memperhitungkan kondisi lokal. Sedangkan kemampuan adaptif Mamluk dan dukungan administratif lokal mengubah medan menjadi keuntungan bagi pihak Mesir.

Biografi Shajar al-Durr

Nama Shajar al-Durr/ Syajarat al-Durr muncul dalam sumber klasik dalam beberapa

²⁴ El Kholy, 'Al-Durr, Shajarat'.

²⁵ Mohamad El-Merheb, 'Louis IX and the Transition from Ayyubid to Mamluk Sultanate', *Crusades*, 22.2 (2023), pp. 215–35, doi:10.1080/14765276.2023.2274342.

²⁶ Ellen Kenney, 'Review: Tree of Pearls: The Extraordinary Architectural Patronage of the 13th-Century Egyptian Slave-Queen Shajar al-Durr', *Journal of the Society of Architectural Historians*, 81.4 (2022), pp. 513–14, doi:10.1525/jsah.2022.81.4.513.

bentuk “Shajar al-Durr”, “Shajarat al-Durr”, atau variasi fonetis lain. Suatu variasi yang menunjukkan pluralitas tradisi penulisan Arab dan perbedaan transmisi naskah. Menurut penelitian terbitan repositori UIN Alauddin, akar identitas Syajarat al-Durr adalah ambigu. Beberapa kronik menyebutnya berketurunan Turki, yang lain menyebut asal Armenia. Perbedaan ini merefleksikan cara penulis sumber klasik mengaitkan asal-usul tokoh dengan narasi politik mereka.²⁷ Syajarat al-Durr awalnya berstatus budak istana (slave-concubine) dan kemudian dimanumiskan hingga menjadi istri Sultan al-Ṣāliḥ. Lintasan sosial yang tidak jarang terjadi di istana-istana Abad Pertengahan Islam dan berimplikasi pada mobilitas politik tertentu.²⁸

Sumber-sumber kontemporer yang menelaah biografinya sepakat bahwa ia pertama kali tampak dalam catatan sebagai penghuni harem khalifah/al-istana sekitar tahun 1239 M, sebuah titik awal yang menjadi dasar rekonstruksi peran awalnya di lingkungan istana. Awalnya berstatus budak (jāriya), Shajar al-Durr mengalami mobilitas sosial yang signifikan ketika ia dipindahkan dari lingkungan khalifah ke istana al-Ṣāliḥ Najm al-Dīn Ayyūb, proses manumisi dan pernikahan kemudian mengubah status politiknya secara dramatis. Para sejarawan kontemporer menekankan kecerdasan politik dan kecakapan administratifnya. Keterampilan surat-menyurat, wawasan ritual kenegaraan, dan kebiasaan berdiplomasi di istana adalah modal penting yang memungkinkannya berperan lebih jauh dari sekadar peran domestik.²⁹

Hubungannya dengan Mamluk Bahri bukan sekadar personal. Shajar al-Durr berhasil menempatkan diri dalam jaringan patronase yang melibatkan komandan-komandan Mamluk, sehingga ketika krisis datang ia memiliki basis dukungan non-dinastik yang kuat. Ketika Sultan al-Ṣāliḥ jatuh sakit dan meninggal pada 1249, keputusan istana untuk merahasiakan wafatnya adalah manuver politis besar dan teks-teks modern melihat Syajarat al-Durr sebagai salah satu figur sentral yang mengoordinasi ritus pemerintahan selama periode genting ini. Peran itu melibatkan tugas-tugas administratif kritis. Menjaga kelangsungan perintah resmi, mengatur

²⁷ Khader Al-Srhan, ‘Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)’, *Arts and Social Sciences Series*, 2.4 (2024), pp. 359–97, doi:10.59759/art.v2i4.409.

²⁸ Nurwahida B, ‘Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M’.

²⁹ Mohammad Muttaqin and others, ‘Shajar Al-Durr and Women’s Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!’, *Proceedings of the 5th International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies, IGCIIS 2022, 19-20 October 2022, Mataram, Lombok, Indonesia*, doi:10.4108/eai.19-10-2022.2329044.

suplai ke garnisun, dan menjembatani komunikasi antara istana dan komandan lapangan.³⁰

Setelah wafatnya al-Ṣālīh dan sebelum Turansyah tiba, langkah-langkah yang diambil Shajar al-Durr membantu menjaga moral pasukan dan struktur pemerintahan sementara, keadaan yang dijadikan banyak peneliti modern sebagai contoh kapasitas praktis aktor istana perempuan. Kedatangan Turansyah dan kemudian pembunuhannya membuka jalan bagi pergeseran politik cepat. Mamluk yang berpengaruh memilih Shajar al-Durr sebagai figur yang dapat menahan stabilitas negara dalam jangka pendek.³¹ Pengangkatan Shajar al-Durr sebagai sultana (sekitar 80 hari) menjadi fenomena unik. Meski singkat, masa ini menandai momen ketika legitimasi *de facto* (berdasarkan kelancaran administrasi dan dukungan militer) mendahului legitimasi *de jure* berbasis keturunan.

Tidak lama setelah itu, untuk meredam resistensi dan mengkonsolidasikan kekuasaan, ia menikah dengan ‘Izz al-Dīn Aybak. Pernikahan politik ini dianalisis dalam literatur sebagai strategi aliansi yang mempertemukan legitimasi istana dengan kekuatan militer. Meski mengalihkan kekuasaan formal kepada Aybak, Syajar al-Durr tetap memegang peran kunci dalam urusan perbendaharaan dan patronase, posisi *de facto* yang membuatnya tetap berpengaruh pada kebijakan negara selama beberapa waktu. Selain peran politik, kajian arsitektural modern menempatkan Shajar al-Durr sebagai patron arsitektur yang signifikan. Wakaf dan bangunan yang diasosiasikan dengannya mencatat upaya membangun legitimasi publik dan religio-kultural.³²

Masa akhir hidupnya dipenuhi konflik intrapolitik. Peristiwa yang berujung pada pembunuhan Aybak (menurut beberapa versi kronik) dan balasan faksi-faksi Mamluk mengakibatkan penangkapannya dan kematian tragisnya pada 1257. Cara kematiannya yang dipublikasikan dalam kronik (penghinaan publik, pemukulan, pembuangan jenazah) dipelajari ulang oleh akademisi kontemporer untuk menunjukkan dinamika gender, stigma sosial terhadap perempuan berkuasa, dan kekerasan politik sebagai instrumen penyingkiran.³³

³⁰ Muttaqin and others, ‘Shajar Al-Durr and Women’s Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!’ (EAI, 2023).

³¹ Al-Srhan, ‘Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)’, 2024.

³² Elizabeth Urban, ‘Tree of Pearls’, *American Journal of Islam and Society*, 39.3–4 (2023), pp. 189–92, doi:10.35632/ajis.v39i3-4.3163.

³³ Roibin Roibin and others, ‘THE DOMESTICATION OF WOMEN’S ROLES AS A REFLECTION OF ANCIENT PATRIARCHAL TRADITIONS: A REFLECTION ON THE THOUGHTS OF FRIEDRICH ENGELS AND FATIMAH MERNISSI’, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 22.1 (2023), p. 53, doi:10.24014/marwah.v22i1.22415.

Pernikahan Shajar al-Durr

Pernikahan Syajarat al-Durr dengan Sultan al-Şālih Najm al-Dīn Ayyūb perlu dipahami dalam kerangka politik patronase. Pernikahan istana sering berfungsi sebagai alat politik untuk mempererat loyalitas dan mengonsolidasikan jaringan elite, bukan sekadar relasi personal belaka. Sumber-sumber lokal modern menempatkan pernikahan itu sebagai hasil pemberian/hibah (*gift*) dari khalifah Abbasiyah kepada al-Şālih, lalu pernikahan formal memperkuat legitimasi hubungan antara sultan Mesir dan pusat khalifah. Dalam praktik ini pernikahan berfungsi sebagai jembatan politik antar-institusi.³⁴

Setelah menikah, posisi Shajar al-Durr meningkat pesat. Statusnya bukan lagi sekadar jariya (budak) tetapi berubah menjadi muwallada/mardhulah yang memiliki akses langsung ke sumber daya istana, yang kemudian dipakai untuk membangun jaringan patronase sendiri. Kelahiran seorang putra (*Khalīl*) adalah fenomena kunci. Dalam kultur istana pada masa itu, ibu dari pewaris mendapatkan legitimasi simbolis yang besar walaupun tragisnya Khalīl wafat dini. Kelahiran itu sempat memperkuat posisi politik Syajarat al-Durr di mata sultan dan istana.³⁵

Pernikahan istana juga membuka akses Syajarat al-Durr terhadap sumber daya wakaf dan patronase arsitektural sebagai alat penting legitimasi politik. Patronase semacam ini digunakan oleh istana untuk menulis kembali status sosial dan politik seseorang di ranah publik. Secara politik, kedekatannya dengan al-Şālih memungkinkannya berinteraksi intens dengan komandan Mamluk Bahri. Hubungan personal itu kemudian menjadi modal ketika Shajar al-Durr memainkan peran manajerial saat sultan jatuh sakit dan perang berlangsung. Sebagai istri sultan, ia menjadi penghubung antara istana pusat dan unsur militer. Pernikahan menempatkannya pada posisi unik untuk menyampaikan kebutuhan garnisun, mengawasi logistik, memediasi tuntutan para amir dan administratif yang penting dalam masa perang.³⁶

Pernikahan juga berfungsi sebagai penyatu jaringan melalui statusnya, Shajar al-Durr mampu merajut hubungan antara faksi-faksi istana, ulama, pejabat sipil, dan komandan militer yang seringkali saling bersaing. Dari perspektif hukum dan fatwa pada masa itu, pernikahan tidak otomatis menjadikan seorang perempuan legitimasi dinastis penuh. Namun dalam praktik

³⁴ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

³⁵ Nurwahida B, 'Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M'.

³⁶ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

realpolitik, status permaisuri memberi ruang tindakan yang signifikan dalam manajemen krisis. Hal ini tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil atas namanya. Setelah masa krisis berlalu, rekam jejak pernikahan tetap memengaruhi perjalanan politiknya selanjutnya. Ketika ia menikah lagi (dengan Aybak) sebagai langkah konsolidasi, asal-usul pernikahan pertama tetap menjadi modal legitimasi informal yang terus dipakai di arena politik.

Kiprah Politik Shajar al-Durr

Peranan Shajar al-Durr selama periode darurat menegaskan bahwa istana Ayyubiyah menyimpan kapasitas administratif yang tidak hanya berada pada pejabat laki-laki. Jaringan harem dan perempuan istana juga dapat berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan ketika keadaan mendesak. Sementara komando lapangan berada di tangan para Mamluk, kontinuitas politik di belakang layar. Meterai dokumen, khutbah, penomoran perintah dipertahankan oleh aktor-aktor istana. Shajar al-Durr adalah penghubung penting antara logika ritus kenegaraan dan kebutuhan tempur di garis depan. Keterlibatan aktifnya dalam urusan negara membuatnya memperoleh legitimasi *de facto* di mata sejumlah amir Mamluk. Mereka melihatnya sebagai penerus praktik pemerintahan al-*Ṣāliḥ* yang menyingkirkan kekosongan kepemimpinan pada saat negara terancam.³⁷

Setelah Turansyah tiba kemudian tewas dalam pusaran intrik politik, vakum kekuasaan memberi kesempatan bagi pengambilalihan yang cepat. Para pemimpin Mamluk memilih Shajar al-Durr sebagai figur penguasa sementara karena ia dianggap paling mampu menjaga kestabilan dalam jangka pendek. Pengangkatan Shajar al-Durr sebagai sultana pada 1250 merupakan peristiwa luar biasa dalam tradisi politik Muslim. Meskipun masa pemerintahannya singkat, keputusan itu mencerminkan pilihan pragmatis elite militer yang mengutamakan stabilitas dan kontinuitas negara di tengah ancaman eksternal. Selama masa singkat itu, Shajar al-Durr menjalankan fungsi-fungsi inti kenegaraan. Ia memastikan khutbah-khutbah Jumat menyebutkan nama penguasa yang disahkan, mengawasi pengedaran perintah administratif, dan memerintahkan distribusi hadiah serta imbalan kepada pasukan.³⁸

Selain fungsi administratif, kiprahnya juga melibatkan dimensi diplomatik. Perundingan pembebasan tawanan Perang Salib dan pengaturan pengembalian Damietta memerlukan

³⁷ Nurwahida B, 'Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M'.

³⁸ Muttaqin and others, 'Shajar Al-Durr and Women's Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!' (EAI, 2023).

otoritas dan koordinasi yang didukung oleh kapasitas istana yang dipimpinnya sementara.³⁹ Selain fungsi administratif, kiprahnya juga melibatkan dimensi diplomatik: perundingan pembebasan tawanan Perang Salib dan pengaturan pengembalian Damietta memerlukan otoritas dan koordinasi yang didukung oleh kapasitas istana yang dipimpinnya sementara.

Peran Shajar al-Durr tidak lepas dari jaringan patronase. Posisinya sebagai mantan permaisuri membuatnya memiliki akses ke jaringan ulama, sekretariat, dan komandan yang dapat menjadi penopang kebijakan-kebijakannya ketika keadaan genting. Namun legitimasi yang ia peroleh bersifat rapuh yang bergantung pada dukungan militer dan penerimaan publik. Sehingga ia memilih menikah dengan ‘Izz al-Dīn Aybak (Aibak) sebagai upaya konsolidasi politik yang menggabungkan legitimasi istana dengan kekuatan militer baru. Pernikahan politik itu menandai pergeseran. Shajar al-Durr menyerahkan jabatan formal kepada Aybak namun tetap mempertahankan pengaruh besar, terutama dalam urusan perbendaharaan dan patronase posisi *de facto* yang memperpanjang peran politiknya meski tidak lagi memegang gelar sultana.⁴⁰

Selama periode setelahnya, ia terlibat dalam politik intrik istana; konflik kepentingan di antara kelompok-kelompok Mamluk (Shâlihiyah vs Mu‘izziyah) memunculkan tekanan yang kemudian mengarah pada tindakan-tindakan keras, termasuk keputusan kontroversial yang menempatkannya pada posisi rentan. Keputusan Shajar al-Durr untuk menyingkirkan Aybak (menurut beberapa sumber), memicu gelombang balasan dari kelompok yang merasa terancam oleh konsentrasi kekuasaan perempuan tersebut.⁴¹ Konflik internal yang memuncak pada 1257 berujung tragis. Shajar al-Durr ditangkap, dihina secara publik, dan dibunuh. Meski demikian, warisan politiknya bertahan. Penguatan otoritas Mamluk yang kelak membangun struktur pemerintahan berjangka panjang. Kiprah Shajar al-Durr dianggap sebagai momen kritis dalam proses itu.

Menyelesaikan Persoalan dan Mengusir Tentara Salib di Mesir

Ketika Sultan al-Şāliḥ Najm al-Dīn Ayyūb jatuh sakit, kelemahan pusat memunculkan risiko runtuhnya moral pasukan; oleh karena itu istana memilih menutup rapat kondisi sultan demi mempertahankan kepercayaan garnisun dan mencegah eksploitasi musuh. Keputusan ini

³⁹ Al-Srhan, ‘Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)’, 2024.

⁴⁰ Al-Srhan, ‘Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)’, 2024.

⁴¹ Nurwahida B, ‘Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M’.

menjadi konteks penting bagi langkah-langkah berikutnya. Dalam kondisi rahasia tersebut, aktor-aktor istana yang mampu mengelola ritual kenegaraan (meterai, surat, khutbah) menjadi tumpuan. Peran administratif ini tidak hanya teknis ia menyangkut legitimasi politis yang harus dipertahankan agar mobilisasi militer tetap berjalan efektif.⁴²

Syajarah al-Durr tampil sebagai koordinator administratif utama pada fase krisis. Ia memastikan perintah-perintah tertulis keluar, suplai ke garnisun teratur, dan komunikasi antara istana dengan komandan di medan tempur tetap lancar fungsi yang ibarat otak birokratik dalam kondisi darurat. Sinergi antara fungsi administratif istana (yang dipelopori oleh figur-figur seperti Syajarah al-Durr) dan kemampuan tempur Mamluk Bahri menghasilkan pengorganisasian defensif yang efektif, dukungan logistik dan koordinasi perintah terbukti menjadi faktor penentu di medan perang.⁴³

Komandan-komandan Mamluk termasuk Baybars (al-Bunduqdari) dan Aibak memanfaatkan ruang administratif yang disediakan istana untuk merumuskan dan melaksanakan manuver militer yang adaptif terhadap medan Delta Nil yang sulit. Keberhasilan taktik lapangan ini erat kaitannya dengan stabilitas komunikasi belakang garis. Peristiwa al-Manshûrah (Februari 1250) memperlihatkan taktik perang gerilya dan perang perkotaan yang efektif. Pasukan Muslim menjerat pasukan Salib di lingkungan kota dan memotong jalur suplai mereka. Operasi yang memerlukan koordinasi terpusat antara strategi lapangan dan pasokan dari belakang.⁴⁴

Kemenangan di al-Manshûrah bukan hanya soal keberanian prajurit. Ia adalah buah dari tatanan administratif yang mampu menjaga kontinuitas perintah meskipun kepala negara sedang sakit atau wafat. Studi kontemporer menekankan dimensi birokratik ini sebagai modal keberhasilan. Penangkapan Louis IX pasca-Fâriskûr menjadi momen krusial. Tawanan raja memberi bargaining power politik dan materiil yang besar. Negosiasi pembebasan dan tebusan menjadi instrumen diplomasi yang menegaskan kemenangan Mesir secara praktis. Diplomasi pembebasan Louis IX membutuhkan legitimasi administratif. Adanya pihak yang mampu menandatangani perjanjian, menerima dan mengelola pembayaran tebusan, serta menjamin kepatuhan terhadap pengaturan safe-conduct. Lagi-lagi fungsi istana yang terorganisir

⁴² Ahmad, 'Kontribusi Dinasti Mamluk Terhadap Peradaban Islam Tahun 1250-1517 M'.

⁴³ Nurwahida B, 'Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M'.

⁴⁴ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

memegang peran kunci.⁴⁵

Kemenangan atas pasukan Salib mempercepat runtuhnya keabsahan Ayyubiyah sebagai rezim tunggal di Mesir dan Syam. Aktor-aktor militer yang membuktikan kemampuan tempur sekaligus diimbangi oleh elite administratif yang menjaga tata negara, sehingga transisi rezim menjadi mungkin. Shajar al-Durr, meski tidak menjadi panglima perang, memainkan peran strategis dengan menjaga kontinuitas administrasi yang memungkinkan komandan lapangan bertindak tanpa gangguan logistik atau kekosongan perintah. Peran ini ia lakukan saat kritis sehingga memberi kontribusi nyata terhadap kemenangan.⁴⁶

Setelah pertempuran, struktur pemerintahan pascaperang harus menegosiasikan pembagian ganjaran kepada para amir dan garnisun. Mekanisme distribusi hadiah, iqtā', dan jabatan diurus lewat saluran administratif yang tertib. Kesuksesan redistribusi ini penting agar dukungan militer tetap stabil. Kebijakan pemberian lahan dan penghargaan finansial kepada Mamluk pascaperang menunjukkan bagaimana kemenangan militer harus dijembatani oleh kebijakan fiskal. Pengelolaan fiskal pascaperang dilakukan lewat kantor-kantor istana yang tetap berfungsi selama dan setelah krisis.⁴⁷

Dampak jangka panjang dari pengusiran tentara Salib adalah restrukturisasi politik. Kemenangan memberi Mamluk legitimasi militer dan akses ke sumber daya negara, sementara aktor administratif yang menjaga stabilitas menjadi fasilitator bagi transisi rezim. Kemenangan juga memungkinkan Mesir mengambil posisi sentral dalam jaringan politik Islam pasca-Ayyubiyah. Otoritas regional kini dipegang oleh aktor baru yang lahir dari kombinasi kekuatan militer dan administrasi negara, bukan semata garis keturunan dinasti sebelumnya.

Kontroversi Kepemimpinan Shajar al-Durr

Pengangkatan Shajar al-Durr sebagai sultanah pada 1250 M memicu perdebatan karena

مِنْ أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْتَعِصِمِ بِاللَّهِ بْنِ الْمُسْتَنْصِرِ - بِاللَّهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَمْرَاءِ الْجُنْدِ
وَالْوُزَرَاءِ فِي مِصْرَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. وَبَعْدُ، فَقَدْ بَلَّغْنَا أَتَّكُمْ وَلَيْتُمْ أَمْرَكُمْ شَجَرَةَ الدُّرِّ، جَارِيَّةَ
الْمَلِكِ الصَّالِحِ، وَقَلَدْتُمُوهَا أُمُورَ الدَّوْلَةِ، وَجَعَلْتُمُوهَا سُلْطَانَةً عَلَيْكُمْ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ
رَجَالًا يَصْلُحُونَ لِلْسُّلْطَانَةِ فَأَخْبَرُونَا لِنُرْسِلَ إِلَيْكُمْ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا. أَمَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ)

⁴⁵ Ahmad, 'Kontribusi Dinasti Mamluk Terhadap Peradaban Islam Tahun 1250-1517 M'.

⁴⁶ Muttaqin and others, 'Shajar Al-Durr and Women's Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!' (EAI, 2023).

⁴⁷ Ahmad, 'Kontribusi Dinasti Mamluk Terhadap Peradaban Islam Tahun 1250-1517 M'.

menantang norma politik yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tertinggi. Keputusan Mamluk untuk mengangkatnya tampak pragmatis, menjaga stabilitas negara tetapi menimbulkan kegelisahan di arena teologis dan politik.⁴⁸ Reaksi khalifah Abbasiyah di Baghdad sangat keras. Al-Musta'sim menolak pengangkatan perempuan sebagai penguasa dan mengirim surat teguran, yang kemudian dipakai oleh lawan-lawan Syajar al-Durr untuk menekan legitimasi formalnya. Tekanan ini menunjukkan bahwa legitimasi dinasti dan persetujuan khalifah masih menjadi faktor penting politik Islam abad pertengahan.⁴⁹

“Dari Abû Ahmad ‘Abd Allâh al-Musta‘shim bi Allâh ibn al-Mustanshir bi Allâh, Amîr al-Mu‘minîn, kepada para pimpinan pasukan dan menteri-menteri di Mesir. Assalamu ‘alaikum. Kemudian daripada itu, telah sampai informasi kepada kami bahwa kalian menyerahkan urusan kepemimpinan kepada Syajar al-Durr, budak al-Malik al-Shâlih, serta kalian mempercayakan permasalahan kenegaraan kepadanya dan mengangkatnya sebagai pemimpin atas kalian. Apabila tidak ada di antara kalian kaum lelaki yang layak menjalankan pemerintahan, maka beritahukanlah kepada kami supaya kami mengirimkan lelaki yang sanggup melaksanakannya. Apakah kalian tidak pernah mendengar hadis Nabi saw yang menyatakan bahwa suatu masyarakat tidak beruntung apabila menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang perempuan?”

Selain teguran khalifah, sejumlah ulama dan tokoh keagamaan menentang gagasan seorang perempuan memegang kekuasaan absolut. Penolakan itu sering dilandasi oleh bacaan tertentu terhadap hadis dan tradisi politik yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki. Polemik ini menjadi salah satu inti kontroversi. Di pihak lain, sebagian besar komandan Mamluk Bahri menerima dan mendukung Shajar al-Durr karena praktiknya mampu menjaga kesinambungan pemerintahan saat krisis (rahasia wafatnya al-Şâlih, koordinasi militer), sehingga legitimasi de-facto (berbasis kemampuan) menyaingi klaim legitimasi de-jure (berbasis aturan).⁵⁰

Kajian kontemporer menekankan bahwa dukungan Mamluk bukan sekadar soal loyalitas

⁴⁸ Muttaqin and others, ‘Shajar Al-Durr and Women’s Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!’ (EAI, 2023).

⁴⁹ Al-Srhan, ‘Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)’, 2024.

⁵⁰ Muttaqin and others, ‘Shajar Al-Durr and Women’s Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!’ (EAI, 2023).

personal, melainkan kepentingan korporat. Mamluk butuh figur yang bisa menampung otoritas sementara tanpa langsung menenggelamkan hak-hak mereka. Shajar al-Durr memenuhi fungsi itu. Dukungan militer inilah yang memungkinkan pengangkatannya awalnya.⁵¹ Namun dukungan militer itu rapuh. Kelompok-kelompok Mamluk berbeda kepentingan (garis-garis pro-al-Shâlih vs pro-Aybak) sehingga koalisi yang mengangkat Shajar al-Durr segera diuji ketika persoalan pembagian kekuasaan dan hadiah pascaperang muncul. Perbedaan faksi ini mempercepat eskalasi konflik politik.

Kritik ulama terhadap kepemimpinan perempuan tidak hanya bersifat doktrinal. Dalam beberapa tulisan kontemporer tampak argumen bahwa penunjukan Shajar al-Durr melanggar norma-norma politik prosedural (suksesi, baiat ulama), sehingga menimbulkan preseden yang dianggap berbahaya oleh kalangan yang mempertahankan tatanan dinasti. Selain argumen teologis-hukum, ada juga kritik yang bersifat kultural. Sebagian kelompok melihat pengangkatan perempuan sebagai anomali yang dapat memicu disorientasi sosial-politik, sehingga reaksi publik (termasuk demonstrasi dan penolakan elite di Syam) memperkuat tekanan terhadapnya.⁵²

Sisi lain dari kontroversi ialah soal legitimasi internasional. Penguasa Suriah dan pemimpin Ayyubiyah lainnya menolak berbaiat, sehingga wilayah-wilayah luar Mesir memutuskan otonomi sementara. Konsekuensi nyata dari kontroversi internal yang meluas ke politik regional. Dalam perspektif politik praktis, sejumlah akademisi Muslim kontemporer menilai pengangkatan Shajar al-Durr sebagai pilihan rasional jangka pendek untuk mengutamakan kelangsungan negara saat ancaman eksternal. Tetapi pilihan itu tidak dirancang sebagai solusi jangka panjang sehingga mudah runtuh setelah kondisi krisis berlalu.⁵³

Kontroversi ini juga memunculkan perdebatan internal tentang hubungan antara hukum (syariah) dan maslahat (kepentingan umum). Pendukung Shajar al-Durr menggunakan argumen maslahat kenegaraan untuk membenarkan aksinya, sedangkan penentang menekankan teks normatif yang membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan.

⁵¹ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

⁵² Muttaqin and others, 'Shajar Al-Durr and Women's Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!' (EAI, 2023).

⁵³ Muttaqin and others, 'Shajar Al-Durr and Women's Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!' (EAI, 2023).

Pertarungan wacana itu intens di literatur kontemporer.⁵⁴ Eskalasi konflik akhirnya bertumpu pada intrik internal istana. Ketika Shajar al-Durr diduga memerintahkan pembunuhan Aybak, itu menjadi titik balik yang mengubah simpati menjadi permusuhan terbuka. Peristiwa yang menandai hilangnya basis dukungan politiknya.

KESIMPULAN

Shajar al-Durr muncul sebagai figur perempuan paling berpengaruh dalam sejarah politik Mesir abad ke-13 karena kemampuannya membaca situasi krisis dan mengelola kekuasaan pada momen transisi antara runtuhnya Dinasti Ayyubiyah dan lahirnya Dinasti Mamluk. Ia tidak hanya memperoleh posisi karena kedekatannya dengan Sultan al-Ṣāliḥ Najm al-Dīn Ayyūb, tetapi juga karena kecakapannya dalam administrasi istana, manajemen krisis, dan kemampuan mengoordinasi ritus kenegaraan ketika otoritas formal lumpuh. Kemampuannya menutup kabar wafatnya sultan, menjaga kelangsungan perintah, serta memfasilitasi komunikasi antara istana dan komandan Mamluk memperlihatkan bahwa ia memiliki kapasitas intelektual dan organisatoris yang melampaui peran domestik perempuan pada masanya.

Keterlibatan Shajar al-Durr dalam pengusiran pasukan Salib pada Perang Salib VII menunjukkan bahwa stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh otoritas administratif yang mampu menjaga kontinuitas pemerintahan. Ia memainkan peran strategis pada momen-momen krusial, khususnya menjelang kemenangan kaum Muslim di al-Manshūrah dan penangkapan Louis IX, yang memperkuat legitimasi Mamluk sebagai aktor politik baru. Setelah itu, dinamika politik pasca-Ayyubiyah memperjelas bahwa dukungan militer menjadi faktor utama yang menentukan arah suksesi, sehingga pengangkatan Shajar al-Durr sebagai sultanah meskipun kontroversial secara teologis dan politik merupakan langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas negara pada fase peralihan.

Namun demikian, kekuasaan Shajar al-Durr tetap rapuh karena bertumpu pada dukungan militer yang terpecah dan oposisi legitimasi dari otoritas keagamaan, terutama khalifah Abbasiyah. Kontroversi mengenai kepemimpinannya, kritik ulama terhadap perempuan sebagai pemimpin, dan intrik internal Mamluk melemahkan stabilitas politik yang ia coba bangun. Peristiwa pembunuhan Aybak dan kematiannya yang tragis menutup fase singkat namun monumental dalam sejarah Mesir. Warisan politik Shajar al-Durr tetap signifikan: ia

⁵⁴ Al-Srhan, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', 2024.

menjadi simbol kapasitas perempuan dalam kepemimpinan, sekaligus menjadi katalis paling penting bagi transisi menuju era Mamluk, salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah Mesir Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sulaeman, 'Kontribusi Dinasti Mamluk Terhadap Peradaban Islam Tahun 1250-1517 M' (unpublished, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2024)
- Al-Srhan, Khader, 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', *Arts and Social Sciences Series*, 2.4 (2024), pp. 359–97, doi:10.59759/art.v2i4.409
- , 'Shajar Al-Durr and Her Political and Administrative Role in the Late Ayyubid Era and the Beginning of the Mamluk Era (637-655 A.H. / 1239-1257 A.D.)', *Arts and Social Sciences Series*, 2.4 (2024), pp. 359–97, doi:10.59759/art.v2i4.409
- Elizabeth Urban, 'Tree of Pearls', *American Journal of Islam and Society*, 39.3–4 (2023), pp. 189–92, doi:10.35632/ajis.v39i3-4.3163
- El-Merheb, Mohamad, 'Louis IX and the Transition from Ayyubid to Mamluk Sultanate', *Crusades*, 22.2 (2023), pp. 215–35, doi:10.1080/14765276.2023.2274342
- Jusmiati, Jusmiati, 'Peranan Shalahuddin Al-Ayyubi Terhadap Dinasti Ayyubiyah' (unpublished, UIN Alauddin Makassar, 2021)
- Kenney, Ellen, 'Review: Tree of Pearls: The Extraordinary Architectural Patronage of the 13th-Century Egyptian Slave-Queen Shajar al-Durr', *Journal of the Society of Architectural Historians*, 81.4 (2022), pp. 513–14, doi:10.1525/jsah.2022.81.4.513
- Kholy, Azza El, 'Al-Durr, Shajarat', in *Oxford Research Encyclopedia of African History* (Oxford University Press, 2020), doi:10.1093/acrefore/9780190277734.013.486
- Mizan, Khairul, and others, 'HISTORY OF ISLAMIC CIVILIZATION IN THE AYYUBIYAH DYNASTY (1171-1250 AD)', *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, 15.1 (2023), pp. 27–50, doi:10.21093/fj.v14i2.5357
- Muttaqin, Mohammad, and others, 'Shajar Al-Durr and Women's Leadership in the Abbasid Caliphate: Not Easily Accepted!', *Proceedings of the 5th International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies, IGCIIS 2022, 19-20 October 2022, Mataram, Lombok, Indonesia*, doi:10.4108/eai.19-10-2022.2329044
- , and others, 'Shajar Al-Durr and Women's Leadership in the Abbasid Caliphate: Not

-
- Easily Accepted!’, *Proceedings of the 5th International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies, IGCIIS 2022, 19-20 October 2022, Mataram, Lombok, Indonesia*, doi:10.4108/eai.19-10-2022.2329044
- Nadhifah, Naura, Arieni Alfakhaera, and Wildana Wargadinata, ‘Dinasti Mamluk: Dari Prajurit Budak Ke Penguasa Mesir Dan Suriah’, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3.Maret (2025), pp. 421–29 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>>
- Nurwahida B, ‘Syajarah Al-Durr: Peranannya Dalam Pembentukan Dinasti Mamluk Di Tahun 1250 M’ (unpublished, UIN Alauddin Makassar, 2022)
- Othman, Muhammed, Karim Hamza, and Farag el HUSSINY, ‘A COMPLETE READING FOR THE FOUNDATION INSCRIPTION OF AL-MADĀRES AL-ŞĀLEĤIYĀ AND ITS ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE PUBLISHED FOR THE FIRST TIME’, *Shedet*, 10.10 (2023), pp. 246–60, doi:10.21608/shedet.2023.292148
- Roibin, Roibin, and others, ‘THE DOMESTICATION OF WOMEN’S ROLES AS A REFLECTION OF ANCIENT PATRIARCHAL TRADITIONS: A REFLECTION ON THE THOUGHTS OF FRIEDRICH ENGELS AND FATIMAH MERNISSI’, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 22.1 (2023), p. 53, doi:10.24014/marwah.v22i1.22415
- Salles, Bruno Tadeu, ‘The Iqtā’ System in Egypt or the Backbone of the Mamluk Sultanate’, *Antíteses*, 17.33 (2024), pp. 384–423, doi:10.5433/1984-3356.2024v17n33p384-423
- Ummatin, Khoiro, *Peradaban Islam Penelusuran Jejak Sejarah* (Kurnia Kalam Semesta, 2021)
- Widiyanti, Dewi, and Muammar Firdaus, ‘Interpreting Women’s Emancipation in the Context of Islamic Multiperspectivism: An Analytical Approach’, *Saree: Research in Gender Studies*, 5.1 (2023), pp. 19–36, doi:10.47766/saree.v5i1.1003.